

Vol 18 No 2, pp 9-16

**AFFILIATION:**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomika dan  
Bisnis Universitas  
Wijayakusuma Purwokerto  
<sup>1</sup>Email:

[bagus.adhitya26@gmail.com](mailto:bagus.adhitya26@gmail.com)

<sup>2</sup>Email:

[hari.unwiku@gmail.com](mailto:hari.unwiku@gmail.com)

**\*CORRESPONDENCE:**

[bagus.adhitya26@gmail.com](mailto:bagus.adhitya26@gmail.com)

**THIS ARTICLE IS  
AVAILABLE IN:**

[http://mimb-  
unwiku.com/index.php/mimb](http://mimb-unwiku.com/index.php/mimb)

**ARTICLE HISTORY**

**Received:**

20 Agustus 2021

**Reviewed:**

25 September 2021

**Revised:**

22 September 2021

**Accepted:**

28 September 2021

**HOW TO CITE:**

Adhitya B., Winarto, H., & Prabawa, A. (2021). Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi Spasial di Provinsi Jawa Tengah. *Majalah Ilmiah Manajemen & Bisnis (MIMB)*, 18(2), 9-16

**Article Type:** Research Paper

**Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi Spasial di  
Provinsi Jawa Tengah**

Bagus Adhitya<sup>1)</sup>, Hari Winarto<sup>2)</sup>, Agus Prabawa<sup>3)</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi daerah yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan serta menganalisis interaksi spasial perekonomian antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Objek dari penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik dalam penelitian ini menggunakan analisis skalogram dan analisis model gravitasi. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis skalogram dan indeks sentralitas pada tahun 2019 dengan menggunakan 30 jenis fasilitas, menghasilkan 6 hirarki daerah berdasarkan ketersediaan jenis fasilitas di setiap kabupaten/kota. Hirarki I adalah kabupaten/kota dengan ketersediaan fasilitas paling/memiliki nilai sentralitas yang paling tinggi yakni ada 11 kabupaten/kota. Pada hirarki II terdapat 5 kabupaten/kota. Hirarki III terdapat 7 kabupaten/kota. Hirarki IV terdapat 6 kabupaten/kota. Hirarki V dan hirarki VI masing-masing terdapat 4 dan 2 kabupaten/kota. Sedangkan hasil dari analisis gravitasi menunjukkan Kota Semarang sebagai salah satu daerah pusat pertumbuhan pada tahun 2019 memiliki interaksi kuat dengan Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Grobogan.

Kata kunci: Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Analisis Skalogram, Analisis Metode Gravitasi

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to identify areas that are growth centers and analyze the spatial interactions of the economy between districts/cities in Central Java Province in 2019. The object of this research is 35 districts/cities in Central Java Province. The technique in this research uses scalogram analysis and gravity model analysis. The results of this study are based on the analysis of the scalogram and centrality index in 2019 using 30 types of facilities, resulting in 6 regional hierarchies based on the availability of types of facilities in each district/city. Hierarchy I is the district/city with the most availability of facilities/has the highest centrality value, namely there are 11 districts/cities. In hierarchy II there are 5 districts/cities. Hierarchy III has 7 districts/cities. Hierarchy IV has 6 districts/cities. Hierarchy V and hierarchy VI have 4 and 2 districts/cities, respectively. While the results from the gravity analysis show that Semarang City as one of the growth centers in 2019 has a strong interaction with Semarang Regency, Demak Regency, Kendal Regency, and Grobogan Regency.*

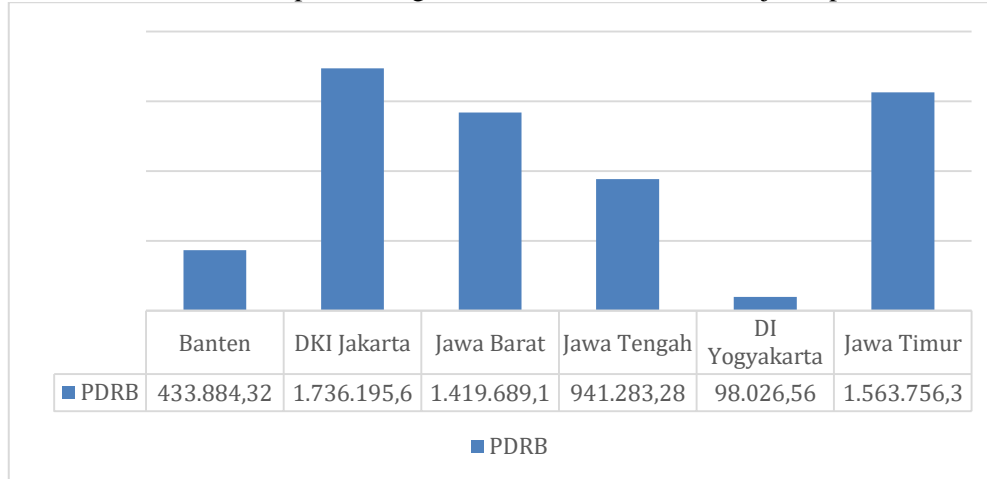
*Keywords: Center for Economic Growth, Scalogram Analysis, Gravity Method Analysis*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Purnomo *et al.* 2021 dan Purnomo, 2021).. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan daerah di sekitarnya terutama dengan masuknya faktor-faktor produksi dari wilayah sekitar. Dalam hal ini faktor jarak dan infrastruktur akan mempengaruhi intensitas interaksi antar wilayah. Daerah yang berdekatan akan memiliki keterkaitan dan interaksi yang lebih kuat dibanding daerah yang jaraknya berjauhan (Hukum Tobler I).

Hubungan saling terkait atau interaksi spasial antar wilayah tidak dapat diabaikan peranannya dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Dua atau lebih kota yang saling berdekatan, meskipun tadinya merupakan kota-kota yang terpisah dan independen, dapat memperoleh manfaat berupa sinergi dari pertumbuhan kota yang interaktif (Batten, 1995 dalam Kuncoro, 2012). Salah satu kebijakan pemerintah untuk mempersempit kesenjangan antar daerah adalah diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan, berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat terjadi keseimbangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita antar wilayah, sehingga dapat menutup atau minimal mempersempit gap kesenjangan ekonomi antar daerah (Kuncoro, 2002).

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang menjadi *pilot project* pengukuran daya saing daerah yang pertama dan melibatkan 35 kabupaten/kota dibawahnya (Lestari & Kurniawan, 2020). Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari provinsi dengan wilayah terluas di Pulau Jawa, yaitu 32.801 Km<sup>2</sup>. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah memiliki besaran PDRB yang paling rendah ke-empat diantara provinsi lain di Pulau Jawa. Secara lebih rinci perbandingan PDRB di Pulau Jawa disajikan pada Gambar 1.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

**Gambar 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019 (Miliar Rupiah)**

Pada tahun 2019 Indeks Wiliamson Provinsi Jawa Tengah bernilai paling tinggi yaitu sebesar 0,64. Nilai Indeks Wiliamson Provinsi Jawa Tengah tersebut menunjukkan ketimpangan wilayah yang cukup tinggi yaitu mendekati 1 atau ketimpangan yang sempurna. Nilai ini menjelaskan bahwa tingkat distribusi pendapatan antar wilayah dalam

konteks ini yaitu kabupaten/kota sangat rendah, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan pendapatan antar wilayah yang tinggi. Namun, ketimpangan antar wilayah tersebut berbanding terbalik dengan ketimpangan pendapatan antar penduduk, ini terlihat dari indeks gini Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 0,36. Menurut nilainya, nilai indeks gini tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat termasuk merata secara umum.

Melihat kondisi tersebut, perekonomian Indonesia yang terus mengalami perubahan, maka peneliti merasa perlu untuk dilakukan penelitian terkait kondisi regionalisasi daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dengan wilayah yang cukup luas di Pulau Jawa namun memiliki PDRB yang cukup rendah ke-tiga di Pulau Jawa. Dengan kondisi wilayah yang cukup luas tersebut perlu ditetapkan adanya wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan, agar terjadi pemerataan pembangunan antar wilayah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, disusunlah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : Kabupaten/Kota manakah yang menjadi wilayah pusat-pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019?, dan Bagaimana interaksi spasial perekonomian wilayah pusat-pusat pertumbuhan terhadap wilayah disekitarnya pada tahun 2019?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Ruang, Wilayah dan Kawasan**

Menurut Tisnaadmidjaja dalam Yusuf (1997), yang dimaksud dengan ruang merupakan wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak. Menurut Hanafiah dalam Prisyarsono dan Sahara (2007), unsur-unsur ruang yang terpenting adalah jarak, lokasi, bentuk dan ukuran (skala). Unsur-unsur tersebut secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah (region). Keempat unsur tersebut inilah yang dapat memberikan perbedaan dengan wilayah lain.

Wilayah didefinisikan Budiharsono (2001) sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal dalam dimensi ruang yang merupakan wadah bagi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang memiliki keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Tarigan (2012) melihat wilayah dalam dua cara pandang yang berbeda, yaitu subjektif dan objektif. Secara subjektif wilayah dipandang sebagai sebuah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu lokasi berdasarkan atas kriteria tertentu dan tujuan tertentu.

Wilayah dalam pengertian fungsional sering disebut sebagai kawasan. Kawasan adalah wilayah dalam batasan fungsional tertentu, yakni suatu wilayah teritorial yang didasarkan pada pengertian, batasan dan perwatakan fungsional tertentu. Menurut Undang-undang No. 26 tahun 2007 mendefinisikan kawasan sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya, sedangkan Undang-Undang No. 24 tahun 1992 mendefinisikannya sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik/khusus.

### **Penetapan Wilayah Pembangunan**

Pendirian dan pengembangan sebuah pusat pertumbuhan suatu daerah diharapkan berjalan secara baik dan terarah, sehingga diperlukan langkah-langkah dan kegiatan yang

saling berkaitan satu sama lainnya. Sjafrizal (2008) menyebutkan setidaknya terdapat lima langkah yang perlu dilakukan untuk menetapkan wilayah pembangunan dan pusat pertumbuhan baru. Langkah-langkah tersebut yaitu: (a) Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu menetapkan lokasi dengan memperhatikan berbagai keuntungan lokasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, (b) Kedua yaitu melakukan penelitian perihal potensi ekonomi wilayah terkait komoditi unggulan yang sudah dimiliki dan atau potensial untuk dikembangkan, (c) Ketiga yaitu melakukan penelitian perihal pada keterkaitan hubungan input output dari masing-masing industri dan kegiatan potensial dikembangkan pada pusat pertumbuhan daerah yang bersangkutan, (d) Keempat yaitu menentukan jenis sarana prasarana yang diperlukan untuk mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan baru tersebut, (e) Terakhir adalah membentuk sebuah organisasi yang akan mengelola dan mengkoordinasi kompleks industri atau pusat pertumbuhan tersebut.

### **Teori Pusat Pertumbuhan**

#### **Teori Pusat Pertumbuhan Ekonomi Menurut Perroux**

Kutub pertumbuhan sendiri menurut Perroux adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak, sebagai tempat memancarnya kekuatan-kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal. Inti dari teori yang di sampaikan oleh Perroux adalah, (a) Pada proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah, yang mana perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan dengan industri unggulan, (b) Pemusatan industri pada satu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian karena akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah, (c) Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (unggulan) dengan industri yang relatif pasif atau industri yang tergantung industri unggulan.

#### **Teori Pusat Pertumbuhan Ekonomi Menurut Hirschman**

Hirschman (dalam Rusdiarti, 2016) berpendapat bahwa karena potensi sumber daya yang tidak seragam dan tidak merata antara region satu dengan region lainnya maka region-region dalam sebuah negara akan tumbuh tidak sama. Untuk dapat tumbuh dengan cepat, suatu negara perlu memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan regional yang mempunyai potensi paling kuat. Apabila region-region kuat ini telah tumbuh maka akan terjadi perembetan pertumbuhan bagi region-region yang lemah. Perembetan pertumbuhan ini bisa berdampak positif (*trickling down effects*), yaitu adanya pertumbuhan region yang kuat dan menyerap potensi tenaga kerja di region yang lemah yang masih menganggur atau mungkin region yang lemah menghasilkan produk yang sifatnya komplementer dengan produk region yang lebih kuat. Sedangkan dampak negatif (*polarization effect*) terjadi kalau kegiatan produksi di region yang kuat bersifat kompetitif dengan produk region yang lemah, yang sebenarnya membutuhkan pembinaan

### **Interaksi Spasial**

Interaksi spasial secara sederhana diartikan sebagai pergerakan atau komunikasi antara wilayah yang berbeda. Usaha untuk mengestimasi pergerakan atau komunikasi antara wilayah tersebut bisa berupa aliran ekonomi (komoditas atau perdagangan antar wilayah), aliran informasi dan aliran mobilitas penduduk (*migrasi*) (Brocker dalam Irsyad, 2018). Menurut Rustiadi et al. (2006), dimensi spasial dalam interaksi antar wilayah dihipotesiskan sebagai fungsi dari jarak atau aksesibilitas. Wang (2017) mengartikan interaksi spasial sebagai hubungan yang mempertimbangkan dinamika penduduk, transportasi, jasa atau informasi antar wilayah yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut dapat berupa pergerakan pariwisata, perjalanan pulang-pergi, migrasi, perdagangan dan pertukaran informasi atau modal.

### **Teori Gravitasi**

## Adhitaya, Winarto dan Surveyandini

Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi Spasial di Provinsi Jawa Tengah

Model gravitasi menurut Tarigan (2006) adalah model yang dapat digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi dan melihat keterkaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah digunakan formulasi sebagai berikut:

$$I_{A-B} = k \cdot \frac{P_A \cdot P_B}{(d_{A,B})^2}$$

Keterangan

$I_{A-B}$  = Kekuatan interaksi antara wilayah A dan B

$k$  = Angka konstanta empiris, nilainya 1

$P_A$  = Jumlah penduduk wilayah A

$P_B$  = Jumlah penduduk wilayah B

$d_{A,B}$  = Jarak wilayah A dan wilayah B

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Secara deskriptif, penelitian akan menjelaskan seberapa kuat interaksi spasial ekonomi yang terjadi antara daerah pusat-pusat pertumbuhan di Jawa Tengah dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah lainnya, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana keseluruhan data tersebut berbentuk panel data yang terdiri dari periode tahun 2019 dan cross section data (data kerat silang) dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data yang digunakan meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, pertumbuhan ekonomi, populasi atau jumlah penduduk, jarak antara provinsi pusat pertumbuhan dengan provinsi dibelakangnya.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model skalogram. Skalogram adalah alat analisis untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan fasilitas yang dimiliki, sehingga dapat ditentukan hierarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah. Kemudian, Indeks sentralitas (Centrality Indeks Analysis) merupakan langkah lanjutan dari analisis skalogram yang dalam analisisnya tidak hanya berdasarkan jumlah fungsi atau fasilitas pelayanan yang ada pada suatu wilayah, tetapi juga berdasarkan frekuensi keberadaan fungsi atau fasilitas tersebut pada wilayah yang ditinjau. Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu (Mutaali, 2003) dengan rumus:

$$C = (x/X)$$

Keterangan:

$C$  = bobot atribut fungsi  $x$

$X$  = jumlah total fungsi dalam sistem

$x$  = Nilai sentralitas gabungan = 100

Indikator yang digunakan dalam penyusunan pusat dan hirerarki pada penelitian ini adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas ibadah dan lembaga kemasyarakatan, fasilitas pasar, perbankan, telekomunikasi dan lainnya.

Adapun untuk menganalisis interaksi spasial menggunakan analisis model gravitasi. Dengan model ini dapat dilihat pengaruh dari wilayah yang satu dengan yang lainnya. Data yang digunakan adalah jumlah penduduk wilayah asal ( $P_i$ ), jumlah penduduk wilayah tujuan ( $P_j$ ) dan jarak wilayah asal ke wilayah tujuan ( $d_{ij}$ ). Tahapan model gravitasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Angka Interaksi } (A_{ij}) = k \frac{P_i \times P_j}{d_{ij}}$$

## Adhitaya, Winarto dan Prabawa

Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi Spasial di Provinsi Jawa Tengah

Keterangan:

$k$  = konstanta rata-rata perjalanan per penduduk

$P_i$  = Penduduk kabupaten i

$P_j$  = Penduduk kabupaten j

$d_{ij}$  = Jarak antara i dan j

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Skalogram

Penelitian ini menggunakan 29 fasilitas publik meliputi (1) TK, (2) SD/MI, (3) SMP/ sederajat, (4) SMA/ sederajat, (5) PT, (6) SLB, (7) rumah sakit, (8) rumah bersalin, (9) puskesmas, (10) puskesmas pembantu, (11) posyandu, (12) pasar, (13) restoran, (14) swalayan/toserba, (15) minimarket, (16) toko/warung kelontong, (17) IMK, (18) bank umum, (19) bank swasta, (20) BPR, (21) kospin, (22) hotel, (23) internet kantor desa, (24) kantor pos, (25) masjid, (26) gereja kristen, (27) gereja katolik, (28) pura dan (29) polsek. Data tersebut kemudian diolah menggunakan rumus skalogram, yang dalam langkah-langkah perhitungannya sudah diuraikan di Bab 3. Berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil perhitungan pusat pertumbuhan, sehingga dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun**

I	II	III	IV	V	VI
Kota Semarang	Kab. Gerobogan	Kab. Klaten	Kab. Tegal	Kab. Demak	Kab. Batang
Kab. Cilacap	Kab. Kebumen	Kab. Boyolali	Kab. Magelang	Kab. Purbalingga	Kab. Temanggung
Kab. Banyumas	Kab. Semarang	Kab. Wonogiri	Kab. Rembang	Kab. Banjarnegara	
Kab. Pemalang	Kab. Blora	Kab. Sidoarjo	Kab. Brebes	Kab. Kudus	
Kab. Pati	Kota Magelang	Kab. Sragen	Kab. Purworejo		
Kab. Jepara		Kab. Karanganyar	Kab. Pekalongan		
Kab. Kendal		Kota Salatiga			
Kab. Wnosobo					
Kota Surakarta					
Kota Pekalongan					
Kota Tegal					

**2019**

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 yang tertera nilai sentralitas dari masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah maka didapatkan 6 hirarki. Pembagian hirarki ini didasarkan atas dasar rumus skalogram. Hirarki I adalah kabupaten/kota dengan ketersediaan fasilitas paling/memiliki nilai sentralitas yang paling tinggi yakni ada 11 kabupaten/kota. Pada hirarki II terdapat 5 kabupaten/kota. Hirarki III terdapat 7 kabupaten/kota. Hirarki IV terdapat 6 kabupaten/kota. Hirarki V dan hirarki VI masing-masing terdapat 4 dan 2 kabupaten/kota.

Funke dan Niebuhr (2005) menemukan pusat pertumbuhan di Jerman terdapat pada wilayah Jerman bagian timur yang mayoritas merupakan wilayah industri dan wilayah ini mampu memberikan spillover effect ke daerah sekitarnya. Pada tahun 2019 pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Grobogan. Disebutkan, khusus Kawasan Industri Kendal yang merupakan proyek strategis nasional memiliki luas 4.500 hektare, sebagian akan digunakan sebagai KEK seluas 1.000 hektare. Kawasan industri yang diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2016, pada 2019 akan berubah menjadi kawasan ekonomi khusus sektor tertentu. Ada lima sektor unggulan, meliputi makanan dan minuman, tekstil dan fesyen, furnitur, otomotif dan elektronik.

### Hasil Analisis Gravitasi

### **Adhitaya, Winarto dan Surveyandini**

#### **Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi Spasial di Provinsi Jawa Tengah**

Hasil analisis gravitasi ini merupakan analisis daerah kabupaten/kota yang menjadi pusat pertumbuhan dari hasil analisis skalogram Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Pada penelitian ini Kota Semarang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan untuk menganalisis nilai interaksi dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut didasarkan pada perhitungan skalogram yang menunjukkan bahwa Kota Semarang merupakan daerah dengan pusat pertumbuhan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan gravitasi Kota Semarang sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019.

Dalam penelitian ini hanya ditemukan satu kecamatan yang dapat dijadikan pusat pertumbuhan yaitu Kota Semarang, sehingga semua kabupaten/kota lainnya merupakan kabupaten/kota hinterland bagi Kota Semarang. Namun angka interaksi terhadap pusat pertumbuhan yang ditunjukkan oleh tiap kabupaten/kota hinterland memiliki jumlah yang berbeda-beda. Jumlah interaksi terendah ditunjukkan oleh interaksi Kota Tegal dengan nilai interaksi hanya 2.714.701.554. Kabupaten/Kota lain yang memiliki nilai interaksi yang rendah terhadap Kota Semarang adalah Kota Magelang dengan jumlah nilai 3.120.039.242 dan Kota Pemalang dengan jumlah nilai 5.571.077.387.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan data-data yang telah dihimpun dan diolah oleh peneliti dengan metode analisis yang ditentukan, maka dari penelitian ini dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut, (1) Hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas pada tahun 2019 dengan menggunakan 30 jenis fasilitas, menghasilkan 6 hirarki daerah berdasarkan ketersediaan jenis fasilitas di setiap kabupaten/kota. Hirarki I adalah kabupaten/kota dengan ketersediaan fasilitas paling/memiliki nilai sentralitas yang paling tinggi yakni ada 11 kabupaten/kota. Pada hirarki II terdapat 5 kabupaten/kota. Hirarki III terdapat 7 kabupaten/kota. Hirarki IV terdapat 6 kabupaten/kota. Hirarki V dan hirarki VI masing-masing terdapat 4 dan 2 kabupaten/kota. (2) Hasil dari analisis gravitasi menunjukkan Kota Semarang sebagai salah satu daerah pusat pertumbuhan pada tahun 2019 memiliki interaksi kuat dengan Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Grobogan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad. L. (2004). *Ekonomi Pembangunan (4th ed)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Budiharsono. S. (2001). *Teknik analisis pembangunan wilayah pesisir dan lautan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Funke. M.. & Niebuhr. A. (2005). Regional Geographic Research and Development Spillovers and Economic Growth: Evidence from West Germany. *Regional Studies*. 39 (1). 143–153.
- Irsyad. M.. & Syahnur. S. (2018). Interaksi Spasial Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*. 3(4): 475-483.
- Kuncoro. M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lestari. A.. & Kurniawan. A. (2020). Kajian Spasial Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. *Jurnal Bumi Indonesia*. 9(3): 1-19.
- Mutaali. L. L. (2003). Studi Penentuan Desa-Desa Pusat
- Prisyarsono. DS dan Sahara. (2007). *Ekonomi Regional: Dasar-Dasar Ilmu Regional*. UT. Jakarta. PP.

**Adhitaya, Winarto dan Prabawa**

Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi Spasial di Provinsi Jawa Tengah

- Purnomo, S. D., Wijaya, M., & Setiawan, H. (2021). Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 18(1), 10-19.
- Purnomo, S. D. (2021). Analysis of Labor Absorption in Central Java Province. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 240-244.
- Rusdiarti. F.. & Fafurida. F. (2016). Strategi Pengembangan Daerah Growth Pole Melalui Pemanfaatan Potensi Lokal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 19(3): 425-440.
- Rustiadi. E. Saefulhakim. S. & Panuju. R. D. (2006). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjafrizal. S. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Terapan*. Padang: Baduose Media.
- Tarigan. R. (2006). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wang. J. (2017). Economic Geography: Spatial Interaction. *International Encyclopedia of Geography: People. the Earth. Environment and Technology*. 1-4.
- Yusuf. A. Q.. (1997). *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Padjajaran.